

**IMPLEMENTASI METODE TOPSIS DALAM EFISIENSI PENYALURAN
BANTUAN BARANG PENDUKUNG PRODUKSI USAHA MIKRO
PADA DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA PADANG
BERBASIS WEB**

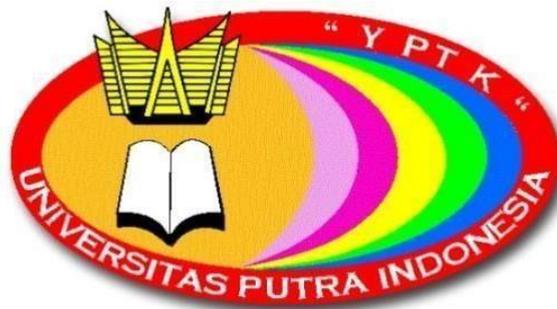
SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Mencapai Gelar Sarjana Komputer

Program Studi : Sistem Informasi

Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)



OLEH:

EKA DELIANA PUTRI

201011527610577

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" PADANG**

2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat memberikan berbagai perubahan dalam proses memperoleh informasi dan pengambilan keputusan dengan lebih cepat dan cermat. Hal ini juga mempengaruhi penggunaan komputer, yang pada awalnya hanya digunakan dalam pengolahan data maupun penyajian informasi, menjadi mampu untuk menyediakan pilihan-pilihan sebagai pendukung pengambil keputusan (Dodoan Ariando Butar-Butar et al., 2020).

Teknologi informasi diterapkan dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan, Kesehatan, dan pemerintahan. Adapun manfaat penerapan teknologi informasi pada pemerintahan adalah memperluas kesempatan komunikasi dua arah antara masyarakat dengan pemerintahan dan meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan.

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang merupakan instansi pemerintahan yang berkewajiban dalam menyampaikan informasi dan melayani bantuan baik bantuan langsung tunai dan non tunai pada masyarakat, serta berfungsi sebagai pengelola dan menentukan arah jalan suatu program pemerintah yaitu penyaluran bantuan pada pihak yang layak untuk diberikan. Dari beberapa bantuan yang disalurkan, salah satunya yaitu bantuan barang pendukung produksi usaha mikro.

Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, terdapat 64,2 juta atau 99,99% usaha kecil dari jumlah pelaku usaha di Indonesia, dengan daya serap tenaga kerja 117 juta atau 97%. Sedangkan peran

UMKM pada perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% diisi oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha.

Dari data diatas, terlihat bahwa pelaku usaha mikro lebih banyak dari usaha lainnya, yaitu dengan jumlah 98,68% dan daya serap tenaga kerja 89% dengan sumbangan terhadap PDB sekitar 37,8%. Oleh karena itu pemerintah berupaya menaikkan kelas usaha mikro menjadi usaha menengah dengan salah satu cara yaitu penyaluran bantuan.

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang perlu memiliki strategi dalam menyalurkan bantuan yang tepat sasaran agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi UMKM. Namun pada proses yang berjalan, proses penyaluran bantuan barang kepada UMKM sering kali tidak efisien. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti banyaknya pelaku usaha menyulitkan penentuan pelaku usaha yang layak menerima bantuan, bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran karena petugas harus mencari pelaku UMKM Produktif, belum memiliki kriteria yang efektif dalam menentukan UMKM layak menerima bantuan, proses seleksi penerima bantuan yang manual dan memakan waktu lama. Teknis penentuan dalam pemberian bantuan berdampak untuk pelaku UMKM produktif yang tepat sasaran.

Mengatasi permasalahan yang telah diuraikan maka diperlukan implementasi teknologi dalam mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan mendistribusikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyaluran bantuan yang efisien. Salah satu caranya dengan penggunaan sistem penunjang keputusan.

Sistem penunjang keputusan merupakan sistem informasi berbasis komputer yang membantu dalam pengambilan keputusan dalam membuat keputusan dengan cara penyediaan informasi yang relevan dan menganalisisnya dengan metode pendukung keputusan(Sasongko, 2022).

Metode pendukung keputusan dapat digunakan dalam menentukan prioritas berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam kelayakan penerima bantuan usaha. Adapun metode yang digunakan adalah metode TOPSIS (*Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution*). Metode TOPSIS merupakan metode pengambilan keputusan multi kriteria dengan prinsip bahwa alternatif terpilih adalah alternatif yang memiliki jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif(Sasongko, 2022).

Penerapan metode TOPSIS memberikan kemudahan pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam mengambil keputusan pemberian bantuan pada pelaku usaha mikro secara efisien (tepat sasaran, objektif, produktif, dan memiliki potensi untuk berkembang).

Dari uraian di atas penulis melakukan penelitian untuk merancang sebuah aplikasi sistem penunjang keputusan dalam efisiensi penyaluran bantuan barang pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dengan judul **“Implementasi Metode TOPSIS Dalam Efisiensi Penyaluran Bantuan Barang Pendukung Produksi Usaha Mikro Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Padang Berbasis Web”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian penting dalam proses penelitian dan merupakan landasan untuk dapat fokus pada masalah yang melatarbelakangi

penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang suatu sistem berbasis website dengan menerapkan metode TOPSIS (*Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution*) untuk efisiensi penyaluran bantuan barang pendukung produksi usaha mikro pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang?
2. Bagaimana metode TOPSIS dapat meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan barang pendukung produksi usaha mikro pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang?
3. Bagaimana implementasi metode TOPSIS dalam efisiensi penyaluran bantuan barang pendukung produksi usaha mikro pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang?

1.3 Hipotesa

Hipotesa merupakan dugaan sementara atau asumsi hasil dari penelitian yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka dugaan sementara dari penelitian ini yaitu:

1. Implementasi metode TOPSIS diduga membantu pengambilan keputusan secara efisien pada penyaluran bantuan barang pendukung produksi usaha mikro pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang.
2. Penerapan metode TOPSIS pada penyaluran bantuan barang pendukung produksi usaha mikro pada dinas koperasi dan UMKM Kota Padang diduga membantu pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang.
3. Metode TOPSIS diduga dapat terimplementasikan pada sebuah sistem informasi berbasis komputer.

1.4 Batasan Masalah

Mengkaji suatu permasalahan diperlukan batasan masalah supaya tidak menyimpang dari tujuan awal penelitian. Adapun batasan masalah yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Metode yang diterapkan dalam analisa data kriteria dan alternatif menggunakan metode TOPSIS.
2. Data yang dianalisis merupakan data pelaku usaha mikro pada tahun 2022.
3. Referensi penelitian bersumber dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, literatur/buku, dan internet.
4. Sistem dibuat dengan Bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hasil yang akan dicapai dalam kegiatan penelitian dengan harapan untuk dapat memberikan dampak pada masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membangun sebuah sistem informasi yang menerapkan metode TOPSIS (*Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution*) dalam menunjang keputusan penyaluran bantuan barang pendukung produksi usaha mikro pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dengan efisien.
2. Menganalisa kriteria dan data pelaku usaha mikro dengan metode TOPSIS dalam menghasilkan alternatif yang dapat meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan barang pendukung produksi usaha mikro pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang.

3. Menerapkan sistem penunjang keputusan dengan metode TOPSIS dalam efisiensi penyaluran bantuan barang pendukung produksi usaha mikro pada dinas koperasi dan UMKM Kota Padang.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan keterlibatan penelitian yang memberikan dampak positif pada penulis, instansi atau objek penelitian, dan pembaca hasil penelitian yang dilakukan. Adapun manfaat dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi penulis
 - a. Menambah pengalaman serta wawasan penulis dalam pemanfaatan teknologi informasi, dengan membuat sebuah perangkat lunak (Software) yang membantu pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam efisiensi penyaluran bantuan.
 - b. Menerapkan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan.
 - c. Penulis dapat memenuhi salah satu syarat kelulusan strata satu (S1), sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia YPTK Padang.
2. Bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang
 - a. Membantu pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam menganalisis data pelaku usaha mikro dalam penyaluran bantuan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang.
 - b. Mampu meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang.

3. Bagi pembaca
 - a. Menambah pengetahuan dan wawasan pembaca dan sumber referensi bagi pembaca.

1.7 Gambaran Umum Objek Penelitian

Gambaran umum objek penelitian berisi data primer yang diperoleh dengan metode observasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil kegiatan dengan metode tersebut berupa penjabaran objek penelitian berupa Sejarah singkat, struktur organisasi, kegiatan, tujuan dan fungsi, serta visi dan misi.

1.7.1 Sejarah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang beralamat di Jl. Ujung Gurun no 3, Ujung Gurun, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan motto “Melayani dengan I S3 (Ikhlas, Sapa, Senyum, Solusi). Koperasi Sehat Anggota Sejahtera, UMKM Kuat Bangsa Berdaulat.”

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang memiliki tugas membantu pemerintah kota Padang dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam lingkup kota madya, sehingga hanya berfokus pada Kota Padang saja.

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang telah mengalami beberapa kali mengalami perubahan nama dan struktur organisasi sejak didirikan pada tahun 1967.

Pada awalnya, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang bernama Kantor Departemen Koperasi Provinsi Sumatera Tengah. Pada tahun 1968 dilepas dari Departemen Dalam Negeri dan digabungkan ke dalam jajaran Departemen

Transmigrasi dan Koperasi. Pada tahun 1974, selanjutnya kembali mengalami perubahan yaitu digabung ke dalam jajaran Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.

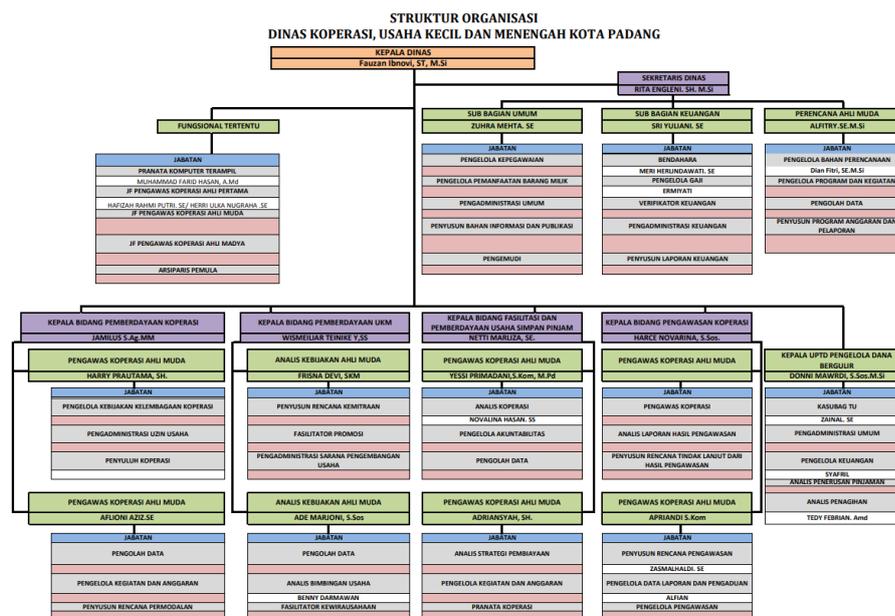
Pada tahun 1978, Direktorat Jenderal Koperasi masuk dalam Departemen Perdagangan dan Koperasi. Pada tahun 1983, Direktorat Jenderal Koperasi ditetapkan menjadi Departemen Koperasi. Pada tahun 1992, Departemen Koperasi berubah nama menjadi Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Pada tahun 1998, Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil berubah nama menjadi Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil. Pada tahun 1999, Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil berubah nama menjadi Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, maka Kantor Departemen Koperasi dan UMKM Kota Padang berubah menjadi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang. Pada tahun 2004, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang digabungkan dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Padang menjadi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Padang.

Pada tahun 2008, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Padang dipisah kembali menjadi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang. Pada tahun 2016, nama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang diubah menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang dan pada tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang dipimpin oleh Fauzan Ibnovi, ST, M.Si

1.7.2 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang

Struktur organisasi merupakan susunan sistem hubungan antar posisi kepemimpinan yang ada dalam organisasi. Struktur organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang diatur berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah dan peraturan daerah kota padang Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. Adapun struktur organisasinya dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang

(Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang)

1.7.3 Kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang

Kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam hal ini sektor UMKM yaitu:

- Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat mengenai pentingnya mendaftarkan produk dan usahanya kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang.

- b. Mendata setiap pelaku UMKM pada tiap kecamatan di kota Padang.
- c. Mengeluarkan izin produk industri rumah tangga (P-IRT).
- d. Melakukan pembinaan dan bantuan terhadap UMKM di kota padang baik berupa bantuan modal, dana, dan pengadaan alat sesuai dengan usaha dari pelaku UMKM tersebut.

1.7.4 Tujuan dan Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang

Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi Misi Walikota Padang dan Wakil Walikota Padang, yang tertera dalam rencana pembangunan jangka menengah Kota Padang yaitu “Mewujudkan Kota Padang yang Madani berbasis Pendidikan Perdagangan dan Pariwisata Unggul serta berdaya saing”. Berdasarkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota, program prioritas dan program unggulan maka disusunlah Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang yaitu: “Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang Inklusif”. Tujuan tersebut meliputi dua hal yakni bertambahnya Koperasi Kategori Sehat dan bertambahnya Pelaku Usaha Mikro “Naik Kelas” menjadi Usaha Kecil.

1.7.5 Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang

Visi dan misi merupakan pedoman suatu organisasi yang memberikan gambaran tujuan yang jelas pada seluruh sumber daya manusia pada organisasi. Adapun visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang yaitu:

1. Visi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang

Visi merupakan rangkaian kalimat sebagai pedoman suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Adapun visi

pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang yaitu:

“Mewujudkan kota padang menjadi kota pendidikan, perdagangan dan pariwisata yang sejahtera, religius, dan berbudaya”

2. Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang

Misi merupakan serangkaian tindakan dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang sebagai berikut:

“Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan”